

NSS: 20.1.05.15.20.117



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1995

KEPUTUSAN
KOMISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 502/015/0/1995

TENTANG

PERBUKAAAN DAN PENEGGERIAN SEKOLAH
TINGKAT PERTAMA (SLTP),
TAHUN 1994/1995

MEMORANDUM NO. 17/1995/10/11/1995

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan van wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995

- Meningat**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 57 Tahun 1990,
 - b. Nomor 29 Tahun 1990,
 - c. Nomor 22 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974,
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pembukaan Sekolah Dasar yang telah diubah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985, Nomor 50/M Tahun 1985,
 - c. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembukaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1994;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 037/00/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 09.1/O/1979;
 - e. Nomor 022/16/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - j. Nomor 0248/II/1985;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	2.460 buah;
d.	SMIK	Negeri	30 buah;
e.	SMKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan Ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6	7
5.	JAWA TIMUR					
A.	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri Nganjuk	-	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	11.1.1.4236.23.01.05.5110 11.1.1.4236.23.01.05.5120 11.1.1.4236.23.01.05.5150 11.1.1.4235.23.01.05.5210 11.1.1.4236.23.01.05.5220 11.1.1.4236.23.01.05.5230 11.1.1.4236.23.01.05.5250 11.1.1.4236.23.01.05.5350
		2. TK Negeri Ponorogo	-	Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	
		3. SMP Negeri 20 Malang	-	Kojen	Kotamadia Malang	11.1.1.4242.23.01.05.5110 11.1.1.4242.23.01.05.5120 11.1.1.4242.23.01.05.5150 11.1.1.4242.23.01.05.5210 11.1.1.4242.23.01.05.5220
		4. SMP Negeri 14 Madiun	-	Taman	Kotamadia Madiun	11.1.1.4242.23.01.05.5230 11.1.1.4242.23.01.05.5250 11.1.1.4242.23.01.05.5350
		5. SMP Negeri 39 Surabaya	-	Rungkut	Kotamadia Surabaya	
		6. SMP Negeri 1 Wonorejo	-	Wonorejo	Kabupaten Situr ✓	NSS: 20.1.05.15.20.117
		7. SMP Negeri 2 Bangorejo	-	Bangorejo	Kabupaten Banyuwangi	
		8. SMP Negeri 7 Bojonegoro	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	
		9. SMP Negeri 2 Kalitidu	-	Kalitidu	Kabupaten Bojonegoro	
		10. SMP Negeri 2 Wringinanom	-	Wringinanom	Kabupaten Gresik	
		11. SMP Negeri 5 Tanggul	-	Tanggul	Kabupaten Jember	